



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/126 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/35 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan adanya pergantian anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025, Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

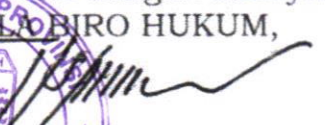
LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/126 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/35
 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
 PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
 PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERANGKAT

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I.	TIM PEMBINA DAN PENGAWAS	
	1. Gubernur Papua Tengah.	Pelindung
	2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.	Pembina
	3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
	4. Inspektur Provinsi Papua Tengah.	Pengawas
II.	TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah.	Kepala UKPBJ Provinsi Papua Tengah
	2. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Koordinator Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
	3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	4. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	6. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE
	7. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	8. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
	10. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
	11. Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	12. Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

III.	13. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Layananan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	1. Alpius Muyapa, S.IP. 2. Paulina Hamadi, S.Si., Apt. 3. Imam Budi Santoso, S.T. 4. Jerry Paryantho Muyapa, S.Huf. 5. Nian Rauf, SKM.,M.Kes. 6. Aloysius Irto Parintak, S.T. 7. Yenni Selina Wambukomo, S.T. 8. Dwi Yanto, S.ST. 9. Nator Dassi, S.ST. 10. Oktovianus Ranteallo, S.T. 11. Gugo May Saltandiana, S.T. 12. Ir. Benyamin A. P., S.T., QRMA 13. Harni Setyowati 14. Julius Lolon, S.T. 15. Daud Pongtuluran, S.T. 16. Rudiana Dumupa, S.T. 17. Yakobus Ukago, Amd. Tek. 18. Milson Panggalo, S.Si	Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja
IV.	PENDAMPING HUKUM	
	1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Pendamping Hukum
V.	STAF TEKNIS/PELAKSANA:	
	1. Alex Albert Willem Sikoway, S.Sos. 2. Eko Budiyanto, SE 3. Masri Muksin, S.STP	Trainer Verifikator Helpdesk
VI.	STAF PENDUKUNG:	
	1. Melika Keiya, S.Sos	Penatausahaan Administrasi

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

